

PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEM PENDIDIKAN

NURUL FADHILAH

Abstract : *In Islam had formed the religious sciences are considered standard as the science of kalam, fiqh and Sufism that improve and keep away from each other. Religious Education as well as Pancasila education and civic education has a direct role to the formation of human qualities Indonesia. Development of Religious Education as a means of fostering the moral society of life, nation and state will be realized, if all parties responsible and linked together showed a strong and consistent commitment to uphold, maintain high moral and ethical standards in environment.*

Kata kunci : Pendidikan Agama, Sistem Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Dalam studi keagamaan sering dibedakan antara kata religion yang biasa dialih bahasakan dengan kata religiosity. Kata yang pertama, religion, yang biasa dialih bahasakan menjadi “agama”, pada mulanya lebih berkonotasi sebagai kata kerja, yang mencerminkan sikap keberagaman atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai keutuhan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, religion bergeser menjadi semacam “kata benda”; ia menjadi himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Proses pembakuan ini berlangsung, antara lain, melalui proses sistemisasi nilai dan semangat agama, sehingga sosok agama hadir sebagai himpunan sabda Tuhan yang terhimpun dalam kitab suci dan literatur keagamaan karya para ulama. Dalam Islam, umpamannya, telah terbentuk ilmu-ilmu keagamaan yang dianggap baku seperti ilmu kalam, fiqh, dan tasawuf yang akhirnya masing-masing berkembang dan menjauhkan diri antara yang satu dengan yang lain.

Sedangkan religiosity lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Istilah

yang lebih tepat bukan religiositas, tetapi spiritualitas. Spiritualitas lebih menekankan substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan diri dari formalisme keagamaan. Biasanya, orang yang merespon agama dengan menekankan dimensi spiritualitas cenderung bersikap apresiatif terhadap nilai-nilai luhur keagamaan, meskipun berada dalam wadah agama lain. Sebaliknya, ia merasaterganggu oleh berbagai bentuk formalisasi agama yang berlebihan, karena hal itu dinilainya akan menghalangi berkembangnya nilai-nilai moral dan spiritual keagamaan (komarudi Hidayat, 2003:1-2). Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kebenaran agama bukan hanya pada dataran eksoterik, melainkan juga esoteris.

Kebenaran dapat diperoleh dari dua sisi, yaitu kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Secara fisiologis, kebenaran yang sebenarnya adalah satu, tunggal, dan tidak majemuk, yakni sesuai dengan realitas. Tetapi, pencapaian kebenaran pada setiap orang berbeda. Dalam konteks agama, semua agama Yahudi, Kristen, Islam, Budha, Hindhu, termasuk aliran kepercayaan-ingin mencapai Realitas Tertinggi (the ultimate Reality). Kristen dan Islam menerjemahkan realitas Tertinggi sebagai Allah (dengan pelafalan yang sedikit berbeda), yahudi sebagai Yehova, juga dengan keyakinan yang lain. Ini berarti bahwa yang dikejar sebagai Realitas Tertinggi itu sebenarnya adalah satu. Itulah yang menyebabkan Frithjof Schoun mengatakan bahwa semua agama itu sama pada alam transendental. Pada alam itu, semua agama mengejar Realitas Tertinggi. (Husein Shahab, 1996:21).

Sisi kedua adalah sisi sosiologis. Ditinjau dari sisi sosiologis, proses pencapaian dan penerjemahan Realitas Tertinggi membuat klaim tentang kebenaran menjadi berbeda. Islam mengatakan bahwa agamanya adalah yang paling benar; begitu pula, Kristen, Budha, Hindu, Yahudi dan aliran kepercayaan mengatakan demikian. Padahal, perbedaan yang terjadi secara hakiki bukan terletak pada Realitas Tertinggi. Di sinilah mulai timbul konflik kebenaran, baik ekstra-agama maupun intra-agama.

Dalam Al-Qur'an terdapat tuntunan yang banyak membicarakan Realitas Tertinggi yang menunjukkan bahwa ia, secara filosofis, tidak menerima kebenaran selainnya. Namun disisi lain (Sosiologis), ia juga dengan sangat toleran menerima

kehadiran keyakinan lain (lakuim dinukum waliy al-din). Disamping itu, para pemikir Muslim cenderung moderat dan sangat toleran.

Atas dasar dua kebenaran tersebut, sebaiknya Realitas Tertinggi dijadikan ugeran atau patokan. Jika Realitas Tertinggi pada hakikatnya adalah satu, maka secara otomatis prinsip-prinsip filosofis yang digunakan semua agama adalah juga satu. Yang sebaiknya dipertahankan bukan simbol agama, melainkan kebenaran yang sebenarnya dikejar oleh setiap agama. (Husein Shahab, 1996:23).

Bambang Sugiharto 1998:29 mengumpamakan agama era postmodern seperti durian jatuh. Berakhirnya perang dingin dan kacaunya kiblat nilai, menyebabkan agama dijadikan sebagai primadona baru peradaban yang menjanjikan. Disisi lain, kenyataannya bagaikan "kejatuhan durian di kepala"; ia pusing dan oleng karena terlalu banyak dibebani harapan post modern. Di satu sisi, ia diharapkan tampil membawa kearifan atau pemecahan persoalan, sedangkan di sisi lain, ia tampil sebagai salah satu penyebab persoalan.

Masih menurut Bambang Sugiharto, tantangan yang dihadapi setiap agama sekarang ini sekurang-kurangnya ada tiga. Pertama, dalam menghadapi persoalan kontemporer yang ditandai dengan disorientasi nilai dan degradasi moralitas, agama ditantang untuk tampil sebagai suara moral yang otentik. Kedua, agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme, mengolahnya dalam kerangka "teologi" baru dan mewujudkannya dalam aksi-aksi kerjasama plural. Ketiga, agama tampil sebagai pelopor perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. (Bambang Sugiharto, 2001:29-30).

Ketiga tantangan diatas menjadi lebih sulit dijawab karena beberapa faktor. Pertama, kemelut dalam masing-masing tubuh agama seringkali muncul ke permukaan, sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain seringkali merupakan ungkapan yang tidak disadari akibat ketegangan dalam tubuh agama itu sendiri. Kedua, paham tentang kemutlakan Tuhan juga memudahkan orang untuk mengidentikkan kemutlakan dengan kemutlakan agamanya. Ketiga, keyakinan bahwa segala tindakan seperti diatas akan dibalas Tuhan dengan pahala, menyebabkan kekerasan terhadap pemeluk agama lain justru dianggap sebagai bagian dari keutamaan moral suatu ironi yang bukan saja kontradiktif, melainkan

juga berbahaya, baik bagi pemeluk agama lain maupun agamanya sendiri, sebab agama yang terus menerus tampil bertentangan dengan nurani kemanusiaan akan kehilangan kredibilitasnya. Keempat, dengan naik-daunnya posisi agama dalam kontelasi peradaban kini, agama pun menjadi rawan ditunggangi kepentingan politik, ekonomi, dan kultur kelompok-kelompok tertentu ataupun pribadi. Jika ini terjadi, agama yang pada awalnya diharapkan menjadi terapi bagi kemelut modernitas, justru akan semakin dirasa sebagai penyakit yang berbahaya. (Bambang Sugiharto, 2001:31-32).

Gagasan diatas menggambarkan agama yang berada dalam posisi yang sulit: di satu sisi, agama diharapkan menjadi problem solver terhadap situasi yang diakibatkan oleh modernitas (teknik), sedangkan disisi lain, konflik antar agama, bahkan intra-agama, belum berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tipologi keberagamaan.

(Komarudin Hidayat, 2003;119-120), meskipun menyebutkan sedikit asal-asalan, menjelaskan tipologi sikap keberagamaan : eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, universalisme. Kelima tipologi ini, masing-masing tidak terlepas atau terputus dari yang lain, dan tidak pula bersifat permanen; tetapi lebih dekat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan.

Eksklusivisme melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya. Agama lain lain sesat dan wajib dikikis, atau pemeluk dikonversi karena, baik agama maupun pemeluknya, dinilai terkutuk dalam pandangan Tuhan.

Inklusivisme berpandangan bahwadiluar agama yang dipeluknya, juga terdapat kebenaran meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya.

Pluralisme berpandangan bahwa secara teologis, pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat misionaris atau dakwah dianggap “tidak relevan”. Eklektivisme adalah sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mozik yang bersifat eklektik.

B. PENDIDIKAN AGAMA DALAM SISTEM DIKNAS

Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Agama dilaksanakan dalam jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Pendidikan dalam jalur sekolah dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat mulai dari pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan dalam jalur luar sekolah dilaksanakan oleh keluarga dan masyarakat. Kedua jalur pendidikan ini harus dilaksanakan secara terpadu, saling isi mengisi dan saling melengkapi, sehingga fungsinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan agama disamping harus dipahami sebagai pranata keagamaan untuk mewariskan nilai-nilai dan tradisi keagamaan, juga harus dipahami sebagai pranata sosial yang ampuh untuk membina masyarakat yang peka kepada penegakan moral dan etika dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Untuk itu Pendidikan Agama tidak harus diletakan sebagai pranata sosial yang tidak eksklusif dan terbuka terhadap nilai-nilai universal lain.

Sebagai pranata sosial keagamaan Pendidikan Agama harus mempunyai kemampuan untuk memberi arah dan tujuan bagi pembinaan dan pengembangan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Agama harus dilaksanakan dan dikembangkan dalam synergi yang terpadu antara keluarga, sekolah dan masyarakat serta dilakukan secara profesional. Untuk itu pendidikan agama harus ditingkatkan kualitas, penyelenggaraannya dan substansi isinya, sehingga pranata sosial ini menjadi alat yang efektif untuk membina dan mengembangkan moral sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan Pendidikan Agama yang berkualitas tidak akan hanya berdampak kepada peningkatan mutu lembaga pendidikan agama yang bersangkutan, tetapi juga akan berpengaruh bagi terbentuknya masyarakat dan lingkungan sosial yang mempunyai kepekaan moral dan etika yang tinggi. Untuk itu, format Pendidikan Agama perlu dikembangkan dalam paradigma-paradigma baru yang lebih tepat berdaya guna, dimana Pendidikan Agama tidak hanya sarat

dengan kandungan nilai-nilai yang bersifat normatif, tetapi juga banyak mengandung nilai-nilai sosial yang lebih terbuka dan aspiratif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang berubah.

Efektivitas Pendidikan Agama sebagai pranata sosial yang mampu memberi arah terhadap pembentukan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terwujud bila pendidikan agama dapat diterima dan ditempatkan sebagai salah satu pilar utama bagi pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Pendidikan Agama harus diberi arti fungsi baru dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan agama sebagai pranata sosial keagamaan harus pula dijadikan common platform bagi seluruh bentuk penyelenggaraan pendidikan, yang bersifat formal dan informal. Pendidikan Agama hendaknya dapat dikembangkan sebagai media pembinaan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang efektif. Untuk itu, Pendidikan Agama haruslah dikembangkan studi-studi dan kajian-kajian yang mendalam tentang efektivitasnya dalam pembinaan moral masyarakat.

Agar pendidikan agama dapat menjadi sarana yang ampuh bagi pembinaan moral masyarakat dan bangsa, maka penyelenggaraan Pendidikan Agama di jalur pendidikan persekolahan perlu dilakukan redefinisi dan reformulasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang berkembang. Untuk itu, Pendidikan Agama agar tidak lagi dipandang sebagai pranata sosial dan budaya yang mempunyai potensi untuk memberi arah bagi pembinaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika sosial serta agama.

Untuk membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki komitmen yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka penyelenggaraan Pendidikan Agama janganlah menjadi keharusan yang bersifat formalistik, dimana persoalannya lebih dikembangkan sebagai keharusan yang bersandar kepada adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat sendiri akan perlu tegaknya moral dan etika yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengembangan Pendidikan Agama sebagai kebutuhan yang sangat mendasar bagi pembentukan dan pembinaan kehidupan masyarakat yang bermoral dan beretika yang tinggi, perlu ditunjang dengan oleh adanya pengembangan pendekatan dan bentuk-bentuk baru yang lebih inovatif dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama, sehingga Pendidikan Agama menjadi sangat responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan dari Pendidikan Agama haruslah terbuka terhadap sasaran pengembangan riset dan studi ilmiah bagi kalangan perguruan tinggi maupun masyarakat ilmiah lainnya.

Pengembangan Pendidikan Agama sebagai sarana pembinaan moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terwujud, bila seluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terkait secara bersama-sama memperlihatkan komitmen yang kuat dan konsisten untuk menegakan, memelihara moral dan etika yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, perlu dipelihara dan dibina secara terus menerus kesatuan pandangan, sikap dan langkah antara unsur sekolah, pemerintah dan masyarakat bahwa penyelenggaraan pendidikan agama akan berhasil bila ketiga unsur pokok diatas tetap dalam komimen yang tinggi.

C. PENUTUP

Pendidikan Agama sebagaimana halnya pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran langsung terhadap pembentukan kualitas manusia Indonesia, sebagaimana dikehendaki oleh tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Perlu digaris bawahi disini bahwa adanya kata-kata manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dlam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, karena kualitas iman dan takwa yang sempurna pada

akhirnya hanya dapat dicapai melalui agama sesuai dengan agama yang dipeluknya dan pendidikan agama itu harus diberikan oleh tenaga pendidik yang memeluk agama yang diajarkannya itu dan sesuai dengan agama peserta didik yang mengikuti pendidikan agama itu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 pasal 28 beserta penjelasan (serta UU Sisdiknas yang baru BAB IV pasal 12, ayat 1 butir a yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Penulis ; Dra. Hj. Nurul Fadhilah, M.Pd adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Adinto, 1998. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, Bandung : Mizan.
- Sugiharto Bambang, 2001. Pendidikan Islam pada Era Global dan Modern, Jakarta : Pustaka Hasanah Baru.
- Hidayat Komaruddin, Relevansi Agama dan Budaya, Jakarta : Pustaka Al Hasanah
- Depdiknas, 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Jakarta: Sinar Grafika.
- Shahab Hussein, 1996. Pendidikan dalam Berbagai Agama suatu tinjauan Filosofis, Yogyakarta : Basis.